



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Rekrutmen ASN 2004 Berpihak Pada Guru
Tanggal : Kamis, 25 Januari 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 8

Honorcer P1 Tinggal 12 Ribu

Rekrutmen ASN 2024 Berpihak Pada Guru



Debby Kurniawan

SENAYAN berharap guru honorer yang telah lulus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tidak dipersulit dengan persoalan administrasi. Proses perampungan dan perpanjangan kerja guru P3K baiknya dilakukan secara otomatis.

“Proses rekrutmen ASN P3K harus berpihak pada guru, dengan memberikan kontrak secara otomatis. Jangan sebentar-sebentar pemberkasan. Karena ini akan menyita waktu mengajar guru,” kata anggota Komisi X DPR Debby Kurniawan di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Debby mengingatkan, persoalan pengangkatan guru honorer merupakan pekerjaan rumah Pemerintah yang harus dituntaskan. Apalagi, saat ini masih banyak guru honorer lulus *passing grade* kategori P1 belum memperoleh formasi.

Untuk itu, dia berharap tata kelola guru ini bisa dibereskan

sebelum akhir tahun 2024.

“Guru kategori P1 menyisaikan banyak. Ini harus rampung di rekrutmen 2024,” tegas legislator Partai Demokrat ini.

Dia menilai, upaya Pemerintah dalam menyelesaikan masalah guru honorer ini sudah cukup baik dan patut diapresiasi. Sebab, sudah ada ribuan guru honorer yang telah memperoleh haknya dan diangkat sebagai ASN. Sudah ada lebih dari 900 ribu guru honorer yang telah mendapat status ASN.

“Tiap tahun sedikit demi sedikit terus berkurang. Saat ini tinggal menyisakan lebih dari 12 ribu guru,” ungkapnya.

Debby menjelaskan, tahun ini Presiden Jokowi menyatakan akan merekrut 2,3 juta ASN. Dari jumlah tersebut, terdapat formasi 419 ribu guru. Dengan jumlah sisa 12 ribu guru kategori P1, tentu ini menjadi kabar gembira bagi mereka.

Diakuinya, menyelesaikan tata kelola guru seperti mengurai benang kusut. DPR akan selalu berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan bagi para guru.

“Guru itu pejuang pendidikan. Jadi, soal tata kelola harus berpihak kepada mereka,” ujarnya.

Tidak hanya itu, perbaikan kesejahteraan ini juga harus menyasar kepada para guru yang telah pensiun.

“Pensiun P3K sudah seelayaknya ASN. Pengabdian mereka harus diperhatikan,” imbuhnya. ■ KAL